

## Potensi Sara di Pilgub Jateng Rendah

**SEMARANG** - Potensi konflik dan isu sara dalam Pilkada di Jateng dinilai berpotensi ada meski rendah. Berbagai pengalaman mengenai kondisi perbedaan pasangan calon dari mayoritas bisa ditampik oleh beberapa peristiwa di Jateng.

Pengamat Politik dan Pemerintahan Undip Teguh Yuwono mengatakan, di Jateng semua calon yang akan maju baik dalam Pilgub atau dalam Pilkada di tujuh daerah memiliki agama mayoritas yakni Islam.

“Banyak faktor kenapa potensi konflik dan isu sara tidak akan berlaku di Jateng. Karena DKI itu kan isu yang digelontorkan adalah Cina dan nonIslam. Di sini, semua kandidat yang akan maju dipastikan Islam,” ungkap Teguh dalam diskusi penelitian ‘Isu Sara dalam Konteks Pilgub’ oleh Bawaslu RI di Kantor Bawaslu Jateng Jalan Pandayan Selatan nomor 1, Kamis (8/6).

Teguh menjabarkan, ada empat alasan kenapa Jateng tidak akan termakan isu sara dalam Pilkada.

Pertama, kandidat yang akan bertarung memiliki homogenitas yakni Islam. Jika ada potensi konflik rasis, maka tidak akan seperti di DKI Jakarta yang mendatangkan massa dari daerah untuk menuju Jakarta sebagai dalil solidaritas muslim.

“Kalau mau membawa setting apa yang terjadi dalam Pilgub Jakarta ke Jateng, maka harus *head to head*. Di Jateng beda, yang ada justru pertarungan antara PDIP dan



Foto: Dok

**Teguh Yuwono**

Bersambung ke hal 7 kol 1

### Potensi .....

(Sambungan hlm 1)

nonPDIP,” imbuhnya.

Faktor ketiga, kata Teguh, yakni di Jateng memiliki pemilih yang masih bersifat tradisional akomodatif. Artinya, pemilih masih taat pada komunitasnya, dan tidak suka dengan hal yang kontras. Jika ada yang berperilaku frontal, hanya ada kurang dari 5 persen saja.

Faktor terakhir yakni banyak tokoh agama di Jateng yang disegani. Tokoh ulama baik dari NU atau pun Muhammadiyah banyak yang menjadi *leader opinion* yang bisa membawa masyarakat untuk lebih menghargai perbedaan.

Teguh mengatakan, solusi yang tepat untuk mencegah praktik politik sara di Jateng yakni dengan melakukan upaya penegakan hukum sebagai *shock therapy* bagi pelaku sara. Tak hanya itu, pendekatan sosial kebudayaan pun masih perlu dilaksanakan termasuk pendekatan melalui pendidikan politik.

Komisioner KPU Provinsi Jateng Hakim Junaedi menanggapi, masalah sara perlu diklasifikasikan dan dijelaskan dengan tegas. Pasalnya, banyak yang mengatakan ‘saya muslim maka saya pilih yang muslim’ untuk menentukan pilihan politiknya. Hal tersebut kemudian ditampik oleh Tenaga Ahli Ba-

waslu RI, Maskur.

“Kalau hanya sebatas mengatakan tanpa embel-embel menghina agama lain, atau menjadikan kata-kata tersebut untuk dirinya saja, maka tidak termasuk sara,” terang Maskur.

Maskur menjelaskan, penelitian soal potensi kampanye sara di Jateng dilakukan mengingat adanya peristiwa fenomenal yang terjadi dalam Pilgub DKI Jakarta. Penelitian yang dilaksanakan Bawaslu RI dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yakni melakukan wawancara mendalam dan diskusi terkait potensi sara di Jateng. Pengontrolan terhadap media sosial pun menjadi penting.

Meski dalam aturan kampanye media sosial yang digunakan wajib didaftarkan di Bawaslu, Maskur mengaku hal tersebut belum berjalan dengan baik. Sejauh ini sanksi yang ditegakkan untuk mengatur soal kampanye sara dalam media sosial baru sebatas di UU ITE. Penjeratan tersebut dianggap tidak efektif lantaran masih banyak penyebar sara dan kebencian di berbagai media sosial dan bersifat viral.

Dalam kegiatan diskusi hadir Pengamat Politik dan Pemerintahan Undip M Yulianto, Ketua Bawaslu Jateng Juhana, Komisioner KPU Jateng Hakim Junaedi, dan KPU daerah. ■  
**M9-yan**